



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Keluarga Besar Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) 2. Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I)
Hari/Tanggal	: Selasa, 28 Januari 2020
Pukul	: 10.00 – 13.30
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Permohonan PP dan Permen sebagai payung hukum rekrutmen PPPK Tahap I dan II sebagai Honorer Kategori dan Honorer Non Kategori; 2. Lain-lain.
Hadir Komisi X DPR RI	: 27 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. R. Sutopo Yuwono Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) DPP DPD Honorer Non Kategori 2 beserta jajaran 2. Titi Purwaningsih Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (Ketum PHK2I) beserta jajaran

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Dr. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) DPP DPD Honorer Non Kategori 2 dan Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (Ketum PHK2I).serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Keluarga Besar Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) dan Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) yang telah menyampaikan aspirasi dan masukannya mengenai permasalahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer. *(bahan paparan terlampir)*
2. DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Keluarga Besar Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) dan Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) menyampaikan aspirasi dan mengusulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Perlu segera membuat regulasi terkait tenaga honorer K2 dan non kategori berdasarkan Dapodik Kemendikbud agar ada pengakuan dan pengangkatan status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer menjadi PNS atau PPPK paling lambat tahun 2021.
 - 2) Perlu pengaturan standarisasi upah/gaji yang layak bagi tenaga honorer sesuai dengan UMR di wilayahnya.
 - 3) Permohonan Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden Berdasarkan Kajian Humanis PGHRI Tentang PP 49 Tahun 2018 sebagai Payung Hukum Rekrutmen Jalur Khusus PPPK Honorer Kategori dan Honorer Non Kategori Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2018-2024 (Bahan terlampir).
 - 4) Mengingat Jumlah Total Guru Nasional ada sebanyak 3.017.296 orang Guru lebih banyak yang bukan PNS yaitu sebanyak 1.534.031 orang sedangkan Guru PNS sebanyak 1.483.265 orang maka perlu perhatian serius terhadap tenaga honorer agar Pendidikan tidak lumpuh. *(berdasarkan data PGHRI dari GTK Kemendikbud RI tahun 2017)*
 - 5) Meminta kepada Komisi X DPR RI berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI agar dapat menyelesaikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk dinaikan statusnya dari honorer menjadi ASN (PNS atau PPPK).

3. Terhadap masukan aspirasi dan paparan yang disampaikan DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Keluarga Besar Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) dan Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I), Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
 - 1) Komisi X DPR RI akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR agar diagendakan rapat gabungan dengan Komisi II dan Komisi XI DPR RI serta mengundang Kementerian terkait.
 - 2) Komisi X DPR RI akan terus mengawal agar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus tenaga honorer mendapatkan hak layak status, layak upah dan layak jaminan sosial.
 - 3) Komisi X DPR RI akan mengusulkan adanya pansus tentang tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Masukan aspirasi DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Keluarga Besar Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) dan Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) akan menjadi bahan pertimbangan Komisi X DPR RI bersama dengan Pemerintah khususnya dengan Kemendikbud RI dan Kementerian terkait.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB

KETUA RAPAT ,



Dr. Abdul Fikri Faqih, MM